



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Bendahara Desa adalah perangkat desa dari unsur staf pada sekretariat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
20. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. Menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Desa dan mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan lokal Desa.
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup Perempuan;
- h. meningkatkan keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- o. Menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.

- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.
- (3) ADD dialokasikan menurut asas merata dan adil.
- (4) Asas merata adalah besaran bagian ADD Merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap desa.
- (5) Asas adil adalah besaran bagian ADD Proporsional (ADDP) yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (6) Sumber Data yang dipakai untuk penghitungan ADDP berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Dalam hal data yang diperlukan tidak tersedia di BPS, Bupati dapat menetapkan data dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal data terlambat atau tidak disampaikan oleh Instansi terkait, penghitungan rincian ADD setiap Desa menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. Pagu ADD Kabupaten x 90% untuk ADDM;
 - b. Pagu ADD Kabupaten x 10% untuk ADDP; dan
 - c. $ADD \text{ setiap Desa} = ADDM + [(ADDP \times (25\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di$

- Kabupaten) + (10% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten) + (30% x rumah tangga miskin desa yang bersangkutan terhadap total jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten)) x 30% angka koefisien tingkat kesulitan geografis]
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ini.

BAB V

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD terintegrasi dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 8

ADD dipergunakan untuk pengeluaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan/pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Tim Pendamping APBDesa Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan desa.

- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset/kekayaan desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1) Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi penundaan pencairan ADD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan oleh Desa hingga batas akhir periode pencairan, maka ADD tahap berikutnya bagi Desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta Anggota BPD, maka Jaminan Kesehatan melalui dana ADD dalam APBDesa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintahan Desa, Tim Pendamping APBDes Kecamatan hingga Tim Fasilitasi APBDes Kabupaten.
- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi APBDes Kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

Ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

Ttd.

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 57 TAHUN 2016
 TANGGAL 29 DESEMBER 2016
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
 DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2017

ALOKASI PAGU ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|---------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | SAMBAS | DALAM KAUM | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.929.040,00 | Rp 465.967.935,00 |
| 2 | SAMBAS | LUBUK DAGANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 49.194.635,00 | Rp 473.233.530,00 |
| 3 | SAMBAS | TANJUNG BUGIS | Rp 424.038.895,00 | Rp 31.336.522,00 | Rp 455.375.417,00 |
| 4 | SAMBAS | PENDAWAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 25.375.674,00 | Rp 449.414.569,00 |
| 5 | SAMBAS | PASAR MELAYU | Rp 424.038.895,00 | Rp 15.899.731,00 | Rp 439.938.626,00 |
| 6 | SAMBAS | DURIAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 21.920.987,00 | Rp 445.959.882,00 |
| 7 | SAMBAS | LORONG | Rp 424.038.895,00 | Rp 49.561.906,00 | Rp 473.600.801,00 |
| 8 | SAMBAS | JAGUR | Rp 424.038.895,00 | Rp 16.419.204,00 | Rp 440.458.099,00 |
| 9 | SAMBAS | TUMUK MANGGIS | Rp 424.038.895,00 | Rp 14.317.098,00 | Rp 438.355.993,00 |
| 10 | SAMBAS | TANJUNG MEKAR | Rp 424.038.895,00 | Rp 23.792.271,00 | Rp 447.831.166,00 |
| 11 | SAMBAS | SEBAYAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 53.017.464,00 | Rp 477.056.359,00 |
| 12 | SAMBAS | KARTIASA | Rp 424.038.895,00 | Rp 76.423.475,00 | Rp 500.462.370,00 |
| 13 | SAMBAS | SAING RAMBI | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.564.582,00 | Rp 461.603.477,00 |
| 14 | SAMBAS | LUMBANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 70.361.093,00 | Rp 494.399.988,00 |
| 15 | SAMBAS | SUNGAI RAMBAH | Rp 424.038.895,00 | Rp 66.711.761,00 | Rp 490.750.656,00 |
| 16 | SAMBAS | GAPURA | Rp 424.038.895,00 | Rp 70.028.850,00 | Rp 494.067.745,00 |
| 17 | SAMBAS | SUMBER HARAPAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 50.237.457,00 | Rp 474.276.352,00 |
| 18 | SAMBAS | SEMANGAU | Rp 424.038.895,00 | Rp 25.930.154,00 | Rp 449.969.049,00 |
| 19 | TELUK KERAMAT | SUNGAI KUMPAI | Rp 424.038.895,00 | Rp 42.582.268,00 | Rp 466.621.163,00 |
| 20 | TELUK KERAMAT | SEKURA | Rp 424.038.895,00 | Rp 60.185.526,00 | Rp 484.224.421,00 |
| 21 | TELUK KERAMAT | TRI MANDAYAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 48.592.842,00 | Rp 472.631.737,00 |
| 22 | TELUK KERAMAT | PEDADA | Rp 424.038.895,00 | Rp 28.690.220,00 | Rp 452.729.115,00 |
| 23 | TELUK KERAMAT | LELA | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.771.918,00 | Rp 465.810.813,00 |
| 24 | TELUK KERAMAT | PURINGAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 31.205.985,00 | Rp 455.244.880,00 |
| 25 | TELUK KERAMAT | BERLIMANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.310.018,00 | Rp 461.348.913,00 |
| 26 | TELUK KERAMAT | SUNGAI BARU | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.618.666,00 | Rp 468.657.561,00 |
| 27 | TELUK KERAMAT | SENGAWANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.908.003,00 | Rp 475.946.898,00 |
| 28 | TELUK KERAMAT | TELUK KASEH | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.696.736,00 | Rp 461.735.631,00 |
| 29 | TELUK KERAMAT | SEPADU | Rp 424.038.895,00 | Rp 21.825.133,00 | Rp 445.864.028,00 |
| 30 | TELUK KERAMAT | TAMBATAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 28.756.353,00 | Rp 452.795.248,00 |
| 31 | TELUK KERAMAT | KUBANGGA | Rp 424.038.895,00 | Rp 36.345.115,00 | Rp 460.384.010,00 |
| 32 | TELUK KERAMAT | SUNGAI SERABEK | Rp 424.038.895,00 | Rp 36.727.153,00 | Rp 460.766.048,00 |
| 33 | TELUK KERAMAT | SAYANG SEDAYU | Rp 424.038.895,00 | Rp 30.410.952,00 | Rp 454.449.847,00 |
| 34 | TELUK KERAMAT | PIPIT TEJA | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.820.016,00 | Rp 456.858.911,00 |
| 35 | TELUK KERAMAT | MATANG SEGANTAR | Rp 424.038.895,00 | Rp 27.636.048,00 | Rp 451.674.943,00 |
| 36 | TELUK KERAMAT | MULIA | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.112.947,00 | Rp 456.151.842,00 |
| 37 | TELUK KERAMAT | TELUK KUMBANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.397.686,00 | Rp 461.436.581,00 |
| 38 | TELUK KERAMAT | SAMUSTIDA | Rp 424.038.895,00 | Rp 58.658.693,00 | Rp 482.697.588,00 |
| 39 | TELUK KERAMAT | TANJUNG KERUCUT | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.200.317,00 | Rp 464.239.212,00 |
| 40 | TELUK KERAMAT | SEBAGU | Rp 424.038.895,00 | Rp 26.165.123,00 | Rp 450.204.018,00 |
| 41 | TELUK KERAMAT | MEKAR SEKUNTUM | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.141.011,00 | Rp 475.179.906,00 |
| 42 | TELUK KERAMAT | KUALA PANGKALAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.404.958,00 | Rp 461.443.853,00 |
| 43 | TELUK KERAMAT | SABING | Rp 424.038.895,00 | Rp 28.548.119,00 | Rp 452.587.014,00 |
| 44 | JAWAI | SARANG BURUNG DANAU | Rp 424.038.895,00 | Rp 76.674.994,00 | Rp 500.713.889,00 |
| 45 | JAWAI | SUNGAI NILAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.368.120,00 | Rp 468.407.015,00 |
| 46 | JAWAI | SARANG BURUNG KOLAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 63.371.215,00 | Rp 487.410.110,00 |
| 47 | JAWAI | SARANG BURUNG USRAT | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.812.786,00 | Rp 465.851.681,00 |
| 48 | JAWAI | SARANG BURUNG KUALA | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.940.933,00 | Rp 459.979.828,00 |
| 49 | JAWAI | PELIMPAAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 63.643.408,00 | Rp 487.682.303,00 |
| 50 | JAWAI | PARIT SETIA | Rp 424.038.895,00 | Rp 48.758.454,00 | Rp 472.797.349,00 |
| 51 | JAWAI | BAKAU | Rp 424.038.895,00 | Rp 50.660.396,00 | Rp 474.699.291,00 |
| 52 | JAWAI | SUNGAI NYIRIH | Rp 424.038.895,00 | Rp 47.312.222,00 | Rp 471.351.117,00 |
| 53 | JAWAI | SENTEBANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 79.179.259,00 | Rp 503.218.154,00 |
| 54 | JAWAI | DUNGUN LAUT | Rp 424.038.895,00 | Rp 43.273.094,00 | Rp 467.311.989,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 | JAWAI | LAMBAU | Rp 424.038.895,00 | Rp 36.688.330,00 | Rp 460.727.225,00 |
| 56 | JAWAI | MUTUS DARUSSALAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.075.937,00 | Rp 459.114.832,00 |
| 57 | TEBAS | TEBAS KUALA | Rp 424.038.895,00 | Rp 67.277.323,00 | Rp 491.316.218,00 |
| 58 | TEBAS | TEBAS SUNGAI | Rp 424.038.895,00 | Rp 89.243.722,00 | Rp 513.282.617,00 |
| 59 | TEBAS | SEMPALAI | Rp 424.038.895,00 | Rp 42.187.997,00 | Rp 466.226.892,00 |
| 60 | TEBAS | BEKUT | Rp 424.038.895,00 | Rp 27.553.498,00 | Rp 451.592.393,00 |
| 61 | TEBAS | SEBERKAT | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.828.217,00 | Rp 475.867.112,00 |
| 62 | TEBAS | SEJIRAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 31.820.487,00 | Rp 455.859.382,00 |
| 63 | TEBAS | MAKRAMPAL | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.632.666,00 | Rp 468.671.561,00 |
| 64 | TEBAS | MEKAR SEKUNTUM | Rp 424.038.895,00 | Rp 43.506.202,00 | Rp 467.545.097,00 |
| 65 | TEBAS | MENSERE | Rp 424.038.895,00 | Rp 47.362.418,00 | Rp 471.401.313,00 |
| 66 | TEBAS | PUSAKA | Rp 424.038.895,00 | Rp 43.559.110,00 | Rp 467.598.005,00 |
| 67 | TEBAS | SEGEDONG | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.414.861,00 | Rp 459.453.756,00 |
| 68 | TEBAS | SUNGAI KELAMBU | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.474.232,00 | Rp 459.513.127,00 |
| 69 | TEBAS | SERUMPUN BULUH | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.350.954,00 | Rp 461.389.849,00 |
| 70 | TEBAS | PANGKALAN KONGSI | Rp 424.038.895,00 | Rp 52.112.631,00 | Rp 476.151.526,00 |
| 71 | TEBAS | DUNGUN PERAPAKAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.762.855,00 | Rp 465.801.750,00 |
| 72 | TEBAS | BATU MAKJAGE | Rp 424.038.895,00 | Rp 75.721.009,00 | Rp 499.759.904,00 |
| 73 | TEBAS | SERINDANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 34.035.562,00 | Rp 458.074.457,00 |
| 74 | TEBAS | BUKIT SIGOLER | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.589.475,00 | Rp 465.628.370,00 |
| 75 | TEBAS | MATANG LABONG | Rp 424.038.895,00 | Rp 60.139.340,00 | Rp 484.178.235,00 |
| 76 | TEBAS | MAKTANGGUK | Rp 424.038.895,00 | Rp 28.641.066,00 | Rp 452.679.961,00 |
| 77 | TEBAS | SEGARAU PARIT | Rp 424.038.895,00 | Rp 48.141.372,00 | Rp 472.180.267,00 |
| 78 | TEBAS | MARIBAS | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.302.970,00 | Rp 464.341.865,00 |
| 79 | TEBAS | SERET AYON | Rp 424.038.895,00 | Rp 53.547.786,00 | Rp 477.586.681,00 |
| 80 | PEMANGKAT | PEMANGKAT KOTA | Rp 424.038.895,00 | Rp 149.500.841,00 | Rp 573.539.736,00 |
| 81 | PEMANGKAT | HARAPAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 97.440.130,00 | Rp 521.479.025,00 |
| 82 | PEMANGKAT | PENJAJAP | Rp 424.038.895,00 | Rp 123.934.570,00 | Rp 547.973.465,00 |
| 83 | PEMANGKAT | JELUTUNG | Rp 424.038.895,00 | Rp 67.052.978,00 | Rp 491.091.873,00 |
| 84 | PEMANGKAT | PERAPAKAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 62.053.841,00 | Rp 486.092.736,00 |
| 85 | PEMANGKAT | SEBATUAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 21.734.591,00 | Rp 445.773.486,00 |
| 86 | PEMANGKAT | GUGAH SEJAHTERA | Rp 424.038.895,00 | Rp 26.930.471,00 | Rp 450.969.366,00 |
| 87 | PEMANGKAT | LONAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 20.961.797,00 | Rp 445.000.692,00 |
| 88 | SEJANGKUNG | SULUNG | Rp 424.038.895,00 | Rp 36.448.475,00 | Rp 460.487.370,00 |
| 89 | SEJANGKUNG | PENAKALAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.849.768,00 | Rp 456.888.663,00 |
| 90 | SEJANGKUNG | SEKUDUK | Rp 424.038.895,00 | Rp 39.363.574,00 | Rp 463.402.469,00 |
| 91 | SEJANGKUNG | SETALIK | Rp 424.038.895,00 | Rp 38.826.013,00 | Rp 462.864.908,00 |
| 92 | SEJANGKUNG | PARIT RAJA | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.211.519,00 | Rp 464.250.414,00 |
| 93 | SEJANGKUNG | PIANTUS | Rp 424.038.895,00 | Rp 39.722.223,00 | Rp 463.761.118,00 |
| 94 | SEJANGKUNG | PERIGI LANDU | Rp 424.038.895,00 | Rp 30.456.569,00 | Rp 454.495.464,00 |
| 95 | SEJANGKUNG | SENDOYAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 66.957.384,00 | Rp 490.996.279,00 |
| 96 | SEJANGKUNG | SENUJUJH | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.199.733,00 | Rp 475.238.628,00 |
| 97 | SEJANGKUNG | PERIGI LIMUS | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.152.638,00 | Rp 468.191.533,00 |
| 98 | SEJANGKUNG | SEMANGGA | Rp 424.038.895,00 | Rp 73.539.493,00 | Rp 497.578.388,00 |
| 99 | SEJANGKUNG | SEPANTAI | Rp 424.038.895,00 | Rp 36.060.630,00 | Rp 460.099.525,00 |
| 100 | SELAKAU | SEMELAGI BESAR | Rp 424.038.895,00 | Rp 77.203.398,00 | Rp 501.242.293,00 |
| 101 | SELAKAU | SUNGAI DAUN | Rp 424.038.895,00 | Rp 57.157.078,00 | Rp 481.195.973,00 |
| 102 | SELAKAU | SUNGAI RUSA | Rp 424.038.895,00 | Rp 55.468.649,00 | Rp 479.507.544,00 |
| 103 | SELAKAU | SUNGAI NYIRIH | Rp 424.038.895,00 | Rp 55.206.825,00 | Rp 479.245.720,00 |
| 104 | SELAKAU | KUALA | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.800.684,00 | Rp 475.839.579,00 |
| 105 | SELAKAU | PARIT BARU | Rp 424.038.895,00 | Rp 90.978.761,00 | Rp 515.017.656,00 |
| 106 | SELAKAU | TWI MENTIBAR | Rp 424.038.895,00 | Rp 59.004.625,00 | Rp 483.043.520,00 |
| 107 | SELAKAU | BENTUNAI | Rp 424.038.895,00 | Rp 67.477.275,00 | Rp 491.516.170,00 |
| 108 | SELAKAU | PANGKALAN BEMBAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 75.667.841,00 | Rp 499.706.736,00 |
| 109 | SELAKAU | PARIT KONGSI | Rp 424.038.895,00 | Rp 48.748.406,00 | Rp 472.787.301,00 |
| 110 | SELAKAU | GAYUNG BERSAMBUT | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.825.171,00 | Rp 475.864.066,00 |
| 111 | PALOH | SEBUBUS | Rp 424.038.895,00 | Rp 148.602.123,00 | Rp 572.641.018,00 |
| 112 | PALOH | NIBUNG | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.480.334,00 | Rp 456.519.229,00 |
| 113 | PALOH | MALEK | Rp 424.038.895,00 | Rp 30.719.781,00 | Rp 454.758.676,00 |
| 114 | PALOH | TANAH HITAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 31.298.730,00 | Rp 455.337.625,00 |
| 115 | PALOH | MATANG DANAU | Rp 424.038.895,00 | Rp 43.191.588,00 | Rp 467.230.483,00 |
| 116 | PALOH | KALIMANTAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 39.534.556,00 | Rp 463.573.451,00 |
| 117 | PALOH | TEMAJUK | Rp 424.038.895,00 | Rp 26.098.751,00 | Rp 450.137.646,00 |
| 118 | PALOH | MENTIBAR | Rp 424.038.895,00 | Rp 42.711.155,00 | Rp 466.750.050,00 |
| 119 | SAJINGAN BESAR | KALIAU' | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.350.298,00 | Rp 456.389.193,00 |
| 120 | SAJINGAN BESAR | SEBUNGA | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.482.293,00 | Rp 464.521.188,00 |
| 121 | SAJINGAN BESAR | SANTABAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 46.962.063,00 | Rp 471.000.958,00 |
| 122 | SAJINGAN BESAR | SENATAB | Rp 424.038.895,00 | Rp 49.827.187,00 | Rp 473.866.082,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 123 | SAJINGAN BESAR | SUNGAI BENING | Rp 424.038.895,00 | Rp 57.698.809,00 | Rp 481.737.704,00 |
| 124 | SUBAH | BALAI GEMURUH | Rp 424.038.895,00 | Rp 39.696.320,00 | Rp 463.735.215,00 |
| 125 | SUBAH | SUNGAI SAPA' | Rp 424.038.895,00 | Rp 27.895.928,00 | Rp 451.934.823,00 |
| 126 | SUBAH | MADAK | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.323.592,00 | Rp 459.362.487,00 |
| 127 | SUBAH | SABUNG | Rp 424.038.895,00 | Rp 28.206.903,00 | Rp 452.245.798,00 |
| 128 | SUBAH | TEBUAH ELOK | Rp 424.038.895,00 | Rp 56.146.065,00 | Rp 480.184.960,00 |
| 129 | SUBAH | SUNGAI DEDEN | Rp 424.038.895,00 | Rp 33.639.435,00 | Rp 457.678.330,00 |
| 130 | SUBAH | BUKIT MULYA | Rp 424.038.895,00 | Rp 28.157.768,00 | Rp 452.196.663,00 |
| 131 | SUBAH | MUKTI RAHARJA | Rp 424.038.895,00 | Rp 26.393.750,00 | Rp 450.432.645,00 |
| 132 | SUBAH | SEMPURNA | Rp 424.038.895,00 | Rp 24.840.237,00 | Rp 448.879.132,00 |
| 133 | SUBAH | MENSADE | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.915.252,00 | Rp 461.954.147,00 |
| 134 | SUBAH | KARABAN JAYA | Rp 424.038.895,00 | Rp 66.473.851,00 | Rp 490.512.746,00 |
| 135 | GALING | SAGU | Rp 424.038.895,00 | Rp 49.138.887,00 | Rp 473.177.782,00 |
| 136 | GALING | SUNGAI PALAH | Rp 424.038.895,00 | Rp 34.921.857,00 | Rp 458.960.752,00 |
| 137 | GALING | GALING | Rp 424.038.895,00 | Rp 36.727.431,00 | Rp 460.766.326,00 |
| 138 | GALING | TEMPAPAN KUALA | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.363.886,00 | Rp 461.402.781,00 |
| 139 | GALING | TEMPAPAN HULU | Rp 424.038.895,00 | Rp 56.051.268,00 | Rp 480.090.163,00 |
| 140 | GALING | RATU SEPUDAK | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.531.109,00 | Rp 456.570.004,00 |
| 141 | GALING | TRI KEMBANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.328.586,00 | Rp 468.367.481,00 |
| 142 | GALING | TRI GADU | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.000.859,00 | Rp 464.039.754,00 |
| 143 | GALING | TELUK PANDAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.121.597,00 | Rp 465.160.492,00 |
| 144 | GALING | SIJANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 38.720.708,00 | Rp 462.759.603,00 |
| 145 | TEKARANG | TEKARANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.118.951,00 | Rp 461.157.846,00 |
| 146 | TEKARANG | MERUBUNG | Rp 424.038.895,00 | Rp 49.379.901,00 | Rp 473.418.796,00 |
| 147 | TEKARANG | CEPALA | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.998.145,00 | Rp 476.037.040,00 |
| 148 | TEKARANG | SARI MAKMUR | Rp 424.038.895,00 | Rp 54.039.907,00 | Rp 478.078.802,00 |
| 149 | TEKARANG | RAMBAYAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 39.373.341,00 | Rp 463.412.236,00 |
| 150 | TEKARANG | SEMPADIAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 68.385.169,00 | Rp 492.424.064,00 |
| 151 | TEKARANG | MATANG SEGARAU | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.703.691,00 | Rp 464.742.586,00 |
| 152 | SEMPARUK | SINGA RAYA | Rp 424.038.895,00 | Rp 64.801.613,00 | Rp 488.840.508,00 |
| 153 | SEMPARUK | SEMPARUK | Rp 424.038.895,00 | Rp 68.861.671,00 | Rp 492.900.566,00 |
| 154 | SEMPARUK | SEPINGGAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 61.177.916,00 | Rp 485.216.811,00 |
| 155 | SEMPARUK | SEPADU | Rp 424.038.895,00 | Rp 48.922.386,00 | Rp 472.961.281,00 |
| 156 | SEMPARUK | SEBURING | Rp 424.038.895,00 | Rp 55.545.359,00 | Rp 479.584.254,00 |
| 157 | SAJAD | JIRAK | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.602.885,00 | Rp 464.641.780,00 |
| 158 | SAJAD | TENGGULI | Rp 424.038.895,00 | Rp 57.805.993,00 | Rp 481.844.888,00 |
| 159 | SAJAD | MEKAR JAYA | Rp 424.038.895,00 | Rp 96.767.452,00 | Rp 520.806.347,00 |
| 160 | SAJAD | BERINGIN | Rp 424.038.895,00 | Rp 59.106.876,00 | Rp 483.145.771,00 |
| 161 | SEBAWI | RANTAU PANJANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 23.834.062,00 | Rp 447.872.957,00 |
| 162 | SEBAWI | TEBING BATU | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.995.589,00 | Rp 469.034.484,00 |
| 163 | SEBAWI | SEBAWI | Rp 424.038.895,00 | Rp 43.183.650,00 | Rp 467.222.545,00 |
| 164 | SEBAWI | SEPUK TANJUNG | Rp 424.038.895,00 | Rp 47.692.350,00 | Rp 471.731.245,00 |
| 165 | SEBAWI | SEBANGUN | Rp 424.038.895,00 | Rp 38.170.622,00 | Rp 462.209.517,00 |
| 166 | SEBAWI | SEMPALAI SEBEDANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.466.064,00 | Rp 465.504.959,00 |
| 167 | SEBAWI | TEMPATAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.954.394,00 | Rp 459.993.289,00 |
| 168 | JAWAI SELATAN | JAWAI LAUT | Rp 424.038.895,00 | Rp 41.201.317,00 | Rp 465.240.212,00 |
| 169 | JAWAI SELATAN | JELU AIR | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.485.067,00 | Rp 464.523.962,00 |
| 170 | JAWAI SELATAN | MATANG TERAP | Rp 424.038.895,00 | Rp 50.414.233,00 | Rp 474.453.128,00 |
| 171 | JAWAI SELATAN | SUAH API | Rp 424.038.895,00 | Rp 32.663.635,00 | Rp 456.702.530,00 |
| 172 | JAWAI SELATAN | SARI LABA A | Rp 424.038.895,00 | Rp 25.296.607,00 | Rp 449.335.502,00 |
| 173 | JAWAI SELATAN | SARI LABA B | Rp 424.038.895,00 | Rp 30.019.247,00 | Rp 454.058.142,00 |
| 174 | JAWAI SELATAN | SEMPERIU A | Rp 424.038.895,00 | Rp 34.684.886,00 | Rp 458.723.781,00 |
| 175 | JAWAI SELATAN | SEMPERIU B | Rp 424.038.895,00 | Rp 37.093.132,00 | Rp 461.132.027,00 |
| 176 | JAWAI SELATAN | SABARAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 35.285.844,00 | Rp 459.324.739,00 |
| 177 | TANGARAN | TANGARAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.108.208,00 | Rp 464.147.103,00 |
| 178 | TANGARAN | SIMPANG EMPAT | Rp 424.038.895,00 | Rp 70.909.340,00 | Rp 494.948.235,00 |
| 179 | TANGARAN | MERABUAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 30.764.468,00 | Rp 454.803.363,00 |
| 180 | TANGARAN | SEMATA | Rp 424.038.895,00 | Rp 44.695.342,00 | Rp 468.734.237,00 |
| 181 | TANGARAN | MERPATI | Rp 424.038.895,00 | Rp 40.333.151,00 | Rp 464.372.046,00 |
| 182 | TANGARAN | PANCUR | Rp 424.038.895,00 | Rp 50.249.761,00 | Rp 474.288.656,00 |
| 183 | TANGARAN | ARUNG PARAK | Rp 424.038.895,00 | Rp 49.122.092,00 | Rp 473.160.987,00 |
| 184 | TANGARAN | ARUNG MEDANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 33.232.709,00 | Rp 457.271.604,00 |
| 185 | SALATIGA | PARIT BARU | Rp 424.038.895,00 | Rp 76.141.084,00 | Rp 500.179.979,00 |
| 186 | SALATIGA | SUNGAI TOMAN | Rp 424.038.895,00 | Rp 66.248.246,00 | Rp 490.287.141,00 |
| 187 | SALATIGA | SERUNAI | Rp 424.038.895,00 | Rp 58.572.749,00 | Rp 482.611.644,00 |
| 188 | SALATIGA | SERUMPUN | Rp 424.038.895,00 | Rp 52.715.604,00 | Rp 476.754.499,00 |
| 189 | SALATIGA | SALATIGA | Rp 424.038.895,00 | Rp 85.262.346,00 | Rp 509.301.241,00 |
| 190 | SELAKAU TIMUR | GELIK | Rp 424.038.895,00 | Rp 47.269.257,00 | Rp 471.308.152,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 191 | SELAKAU TIMUR | SERANGGAM | Rp 424.038.895,00 | Rp 51.277.755,00 | Rp 475.316.650,00 |
| 192 | SELAKAU TIMUR | SELAKAU TUA | Rp 424.038.895,00 | Rp 94.643.740,00 | Rp 518.682.635,00 |
| 193 | SELAKAU TIMUR | BUDUK SEMPADANG | Rp 424.038.895,00 | Rp 46.513.239,00 | Rp 470.552.134,00 |
| Total | | | Rp 81.839.506.735,00 | Rp 9.093.278.565,00 | Rp 90.932.785.300,00 |

BUPATI SAMBAS,
Ttd.
ATBAH ROMIN SUHAILI

Pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

Ttd.

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 57 TAHUN 2016
TANGGAL 29 DESEMBER 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2017

PENGGUNAAN ADD

Penggunaan Alokasi Dana desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan **Skala Prioritas** berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa dan dianggarkan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan ADD tersebut mencakup :

1. Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) kepala Desa dan perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ketentuan dalam pembayaran SILTAP antara lain :
 - a. Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Rincian persentase besaran penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keputusan Bupati tentang besaran penghasilan tetap ditetapkan setiap tahun dengan memperhatikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), kemampuan keuangan Desa, dan kelayakan secara ekonomi; dan
 - e. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
2. Pemberian tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan ketentuan antara lain:
 - a. Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus PNS diberikan tunjangan;
 - c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatanditetapkan setiap tahun anggaran;
 - d. Perangkat Desa dan anggota BPD yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar .
3. Operasional Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;

- c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas; dan
 - k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan Desa.
4. Operasional BPD, yang dikelola oleh Sekretariat Desa sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi:
- a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan;
 - c. makanan dan minuman rapat;
 - d. uang sidang BPD;
 - e. perjalanan dinas; dan
 - f. belanja operasional lain sesuai kebutuhan BPD.
5. Insentif ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga, yang dimaksudkan sebagai biaya operasional sehari-hari bagi Ketua RW dan Ketua RT. Ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
6. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi desa;
 - e. fasilitasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
 - f. fasilitasi Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
 - g. penyelenggaraan pembinaan aparatur desa;
 - h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - i. pengelolaan informasi Desa;
 - j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - l. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - m. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - n. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
7. Kegiatan pembangunan, yang meliputi:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 6. bedah rumah tidak layak huni;
 7. rumah ibadah; dan
 8. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, poskesdes, polindes; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. penguatan permodalan kepada Kelompok UMKM/ Kelompok usaha Ekonomi Potensial lainnya.
 5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. kios dan pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;

11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa.

8. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kepada Pemangku Agama di Desa;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- f. pembinaan lembaga adat;
- g. fasilitasi kegiatan di bidang Kesehatan;
- h. fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- i. pembinaan kesenian, olahraga dan sosial budaya masyarakat; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,

5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

10. Hal-Hal Lainnya

- a. Dalam rangka mendukung peningkatan IPM Kabupaten Sambas khususnya pada Bidang Kesehatan, maka Kepala Desa masih wajib menganggarkan Insentif Bagi Kader Posyandu dan Operasional Pokjandal Posyandu Desa serta pada Bidang Pendidikan khususnya yaitu PAUD.
- b. Dalam rangka peningkatan menampung seluruh kegiatan di Bidang Ekonomi dan/ atau Pelayanan Umum yang dikelola oleh Desa, Kepala Desa dapat menganggarkan pendirian/ penyertaan modal BUMDesa melalui ADD atau DD. Bagi Desa yang akan membentuk BUMDesa, Unit Usaha Simpan Pinjam, besaran penyertaan modal harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- c. Dalam rangka untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Kepala Desa dapat menganggarkan untuk :
 - a. Pembiayaan insentif untuk petugas P2TP2A.
 - b. Peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi kader Satgas Desa dalam melaksanakan tugas.
 - c. Menyiapkan ruangan atau rumah aman untuk menampung korban sementara.

Kepala Desa diharapkan untuk berkoordinasi dengan SKPD teknis yang menangani kasus kekerasan.

- d. Dalam rangka mendukung Gerakan Sayang Ibu (GSI) meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak maka Kepala Desa diharapkan untuk mendukung melalui APBDesa dengan menganggarkan Peningkatan Kapasitas bagi kader Satgas, Biaya Operasional dan Insentif kader Satgas sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan SKPD teknis yang menangani GSI.
- e. Dalam rangka mendukung gerakan perempuan tangguh Pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas perempuan dalam peningkatan kualitas hidup Perempuan, maka Kepala Desa diharapkan untuk mendukung melalui APBDesa dengan menganggarkan Sosialisasi dan/ atau Pelatihan Keterampilan bagi kelompok perempuan serata memberikan bantuan modal usaha bagi Kelompok Perempuan. Kepala Desa dapat

- berkoordinasi dengan SKPD teknis yang menangani gerakan perempuan tangguh Pedesaan.
- f. Dalam rangka mendukung program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, maka diharapkan Kepala Desa untuk mendukung pembiayaan operasional Kampung KB untuk pembentukan dan pembinaan di tingkat RW dan Dusun serta menganggarkan Pengembangan Kapasitas bagi Tim Kampung KB Desa. Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan SKPD teknis yang menangani program Keluarga Berencana.
 - g. Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, maka Kepala Desa untuk dapat menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat, misalnya menciptakan ruang pelayanan yang kondusif bagi masyarakat.
 - h. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), maka Kepala Desa menganggarkan kegiatan untuk mendukung program tersebut, yaitu :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan, misalnya dengan membantu pembangunan WC bagi keluarga yang tidak mampu atau Pembangunan WC Umum;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun, misalnya dengan sosialisasi (poster, pamflet, dll);
 - c. Pengelolaan Air Minum dan makanan Rumah Tangga, misalnya membangun PAH dan sumur Bor;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga, misalnya membuat tempat pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, misalnya membuat saluran pembuangan yang lancar.
 - i. Dalam rangka mendukung pemutakhiran data kependudukan dan akta kelahiran anak, maka diharapkan Kepala Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut, misalnya sosialisasi dan/ atau promosi pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan akta kelahiran anak.
 - j. Dalam rangka menekan kenakalan remaja diharapkan Kepala Desa dapat membuat kegiatan dan membuat wadah/ tempat serta kegiatan-kegiatan yang positif yang sesuai dengan hobi yang diminati remaja pada umumnya.
 - k. Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat desa dan masyarakat dalam proses perizinan, pelayanan perizinan dan penanaman modal maka diharapkan Kepala Desa dapat menganggarkan kegiatan Sosialisasi dan/

4. Belanja perlengkapan pemungutan suara (alat coblos, bantalan, tinta, tanda pengenal dll)
 5. Belanja makanan dan minuman kegiatan;
 6. Belanja lainnya yang menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
 7. Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar Kepala Desa
- u. Penganggaran lainnya disesuaikan dengan Peraturan dan Perundang-undangan serta melihat prioritas penggunaan pendapatan Desa yang diusulkan oleh masyarakat dan rancangan APBDes yang telah disepakati oleh BPD.

Kegiatan perencanaan, penata usahaan, pertanggung jawaban, pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana ADD diselenggarakan menurut ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

BUPATI SAMBAS,

Ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

Ttd.

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003